

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PADA SEKOLAH DASAR NEGERI (SD) DI JAKARTA TIMUR WILAYAH II**

Oleh :

Yoani Mega Pertiwi, Aloysius Rengga

**Jurusan Administasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan kebutuhan untuk mendukung berlangsungnya proses pengembangan sumber daya manusia. Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum dapat menjangkau seluruh penduduknya, salah satu faktor penyebabnya adalah kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yaitu program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan KJP pada Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Timur Wilayah II, serta mencari tau apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Implementasi George Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi serta Pergub No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan media elektronik. Pada kenyataannya di lapangan implementasi KJP masih mengalami masalah terkait dengan maksud dan tujuan dari KJP itu sendiri, sasaran, mekanisme KJP di pihak sekolah, pengawasan dan pelaporan serta terkait dengan larangan dan sanksi. Masukan yang diberikan yaitu diperbaikinya persyaratan pendaftaran dan instrumen wawancara, ditingkatkannya pengawasan oleh sekolah dan memberikan sanksi tegas apabila terjadi pelanggaran, perlunya dibentuk staff khusus disekolah untuk menangani KJP, serta meningkatkan kerjasama sosialiasasi dengan para stakeholder.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kartu Jakarta Pintar, Bantuan Biaya Personal Pendidikan

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan salah satu cara guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan sumber daya manusia mampu menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang selalu berubah. Pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum dapat menjangkau seluruh penduduknya, karena masih banyak masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Salah satu penyebab belum meratanya pendidikan di Indonesia adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan.<sup>1</sup>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengemban tugas untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan yang multi karakteristik, terutama besarnya populasi penduduk dan banyaknya masyarakat kurang mampu

di wilayah perkotaan. Untuk mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu. Khusus untuk Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.<sup>2</sup>

Jumlah peserta didik penerima KJP pada Tahun 2015 telah melebihi jumlah sasaran penerima program KJP yang mengacu pada hasil data PPLS Tahun 2011 yang berjumlah 332.465.

---

<sup>1</sup> Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

---

<sup>2</sup> *Tentang KJP* diakses dari [jakarta.kjp.go.id/](http://jakarta.kjp.go.id/) diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.

Meskipun diakui bahwa terdapat peserta didik yang tidak tercatat di dalam data PPLS, namun selisih yang cukup besar yaitu 229.403 menunjukkan indikasi pemberian KJP yang tidak tepat sasaran. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis. ICW memperkirakan 19,4 persen anggaran KJP salah sasaran. Rinciannya adalah 14,6% di tingkat SD, 3,4% di tingkat SMP, dan 1,4% di tingkat SMA.<sup>3</sup>

Proses pencairan dana KJP telah mengalami perubahan dari yang awalnya dapat ditarik tunai kini hanya dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/ gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP. Peraturan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan pengawasan terhadap penggunaan dana KJP agar lebih terkontrol. Selain itu dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM, namun dana yang

belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa. Perubahan sistem ini tentunya tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masalah juga muncul seperti kasus pencairan dana KJP yang terselubung.

KJP memiliki arti yang strategis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu secara khusus di DKI Jakarta karena posisinya sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan diberlakukannya program KJP diharapkan dapat memutus rantai putus sekolah serta kemiskinan di ibukota. Program KJP yang di tujukkan untuk memenuhi biaya personal peserta didik bagi masyarakat tidak mampu dan anak terlantar, namun nyatanya masih banyak anak terlantar yang tidak bersekolah di Jakarta bahkan anak yang tergolong tidak mampu pun tidak mendapatkan dana bantuan KJP tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada

---

<sup>3</sup> ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah. diakses dari <http://jatimterkini.com/> pada hari Selasa, 9 Desember 2014 pukul 18.00 WIB

Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II

### D. Kerangka Pemikiran Teoritis

Administrasi berasal dari kata *to administer* yang diartikan sebagai *to manage*. Dalam arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali.

Dalam arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang hingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian administrasi publik yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik agar efektif dan efisien. Dalam kaitannya, administrasi publik memiliki keterkaitan tiga aktor umum yaitu pemerintah, swasta serta masyarakat.

Thomas Dye (dalam Said Zainal Abidin, 2012) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut William N. Dunn (dalam Syafiie, 2006) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing, beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

George C. Edward III merupakan ilmuwan penganut aliran *top down*. Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model

implementasi kebijakan pubiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation* dalam Agustino (2006: 149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Menurut George Edward III komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya

manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

Faktor keempat menurut George Edward III adalah struktur birokrasi. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi

yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pada kebijakan Kartu Jakarta Pintar ini telah diatur di dalam Pergub No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar memiliki faktor seperti:

#### (1)Maksud dan Tujuan

Dalam penelitian ini terkait dengan maksud dan tujuan peneliti akan melihat pengimplementasian di lapangan tentang maksud dan tujuan Kartu Jakarta Pintar yang sudah tertuang di dalam Pergub.

#### (2)Sasaran

Sasaran dari Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berdomisili dan bersekolah pada satuan pendidikan di DKI Jakarta. Peserta didik dari keluarga tidak mampu tersebut merupakan peserta didik yang tercatat dalam data PPLS dan/atau tidak tercantum dalam data PPLS. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat

apakah KJP ini sudah tepat sasaran sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub atau belum.

### (3) Mekanisme

Dalam penelitian ini terkait dengan mekanisme akan difokuskan pada 10 tahap implementasi KJP yaitu pendataan dan verifikasi oleh satuan pendidikan, pengumuman daftar sementara calon penerima, pemberian SKTM, penginputan data, pengumpulan dan verifikasi data, besaran, penggunaan, penertapan daftar tetap penerima, pendataan ulang, pencairan dan penyaluran.

### (4) Pengawasan dan Pelaporan

Pada penelitian ini terkait dengan pengawasan dan pelaporan akan difokuskan pada apa saja yang dilakukan orang tua peserta didik penerima KJP dalam hal pertanggung jawaban dana KJP, peran pihak sekolah dalam rangka pengawasan, dan cara pihak sekolah melaporkan hasil pengawasan.

### (5) Larangan dan Sanksi

Larangan dan sanksi terkait dengan KJP dalam penelitian ini akan melihat

bentuk pelanggaran yang dilakukan peserta didik penerima KJP, bentuk pelanggaran yang dilakukan orang tua peserta didik penerima KJP, bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah dalam implementasi KJP, tanggapan dan tindakan pihak sekolah menanggulangi pelanggaran yang dilakukan peserta didik maupun orang tua, serta tanggapan dan tindakan UPT P6O menanggulangi pelanggaran dalam proses implementasi KJP.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini terjadi.

Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II,

sehingga lokus atau tempat/wilayah yang diambil adalah berdasarkan fokus penelitian di atas yakni Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive*/bertujuan. Cara ini dilakukan karena informan yang dipilih sebelumnya, sudah ditentukan dan informan juga benar-benar mengetahui langsung fokus permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas/guru kelas, orang Tua/wali murid, operator sekolah, kepala UPT P6O dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, serta tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data dalam penelitiannya ini dapat dikelompokkan menjadi data primer yaitu diperoleh melalui wawancara dengan informan secara langsung serta data sekunder berupa dokumen, buku, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam tiga langkah yaitu *getting in* (proses memasuki lokasi penelitian), *getting along* (proses berada di lokasi penelitian) serta *logging the data* (proses mengumpulkan data dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi pustaka).

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2010 : 256) dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Penelitian kualitatif harus dapat menunjukkan data yang valid dan reliabel dengan melakukan uji keabsahan data. Gibbs dalam Creswell (2010: 246) mengemukakan bahwa validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Validitas



ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dianggap relevan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi teknik, berarti untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

## **HASIL PENELITIAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II**

#### **1. Maksud dan Tujuan**

Belum tercapainya semua maksud dan tujuan, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan

#### **2. Sasaran**

Belum dapat menjangkau anak terlantar dan gelandangan serta peserta didik yang terdaftar setiap tahunnya tidak presisi dengan data yang menjadi acuan yaitu data PPLS Tahun 2011

### **3. Mekanisme**

Dari tiga sekolah yang peniliti datangi tidak melaksanakan tahap pengumuman daftar calon sementara melalui papan pengumuman sekolah yang mudah terbaca, internet dan/atau karena pada masa pengumuman tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan atas daftar peserta didik calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan. Tahap penginputan masih mengalami kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan internet yang rendah dan keterbatasan informasi. Penggunaan dana KJP dengan menerapkan sistem debit melalui mesin EDC/jaringan prima BCA masih belum bisa menekan penyalahgunaan dana. Karena penggunaan dana KJP melalui ATM Bank DKI bisa dipergunakan di toko manapun, selain itu orang tua masih belum paham mengenai sistem pencairan dan penyaluran dana KJP karena tidak adanya buku pedoman khusus yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan ataupun sekolah

#### 4. Pengawasan dan Pelaporan

Rendahnya pengawasan dari sekolah sehubungan dengan bukti pembelanjaan sebagai alat kontrol penggunaan dan KJP. Dari tiga sekolah yang peneliti datangi melakukan pengumpulan struck pembelanjaan hanya sekali dalam setahun yaitu pada akhir tahun sedangkan menurut peraturan adalah sekali dalam sebulan.

#### 5. Larangan dan Sanksi

Banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta didik maupun orang tua namun tidak ada sanksi langsung dari pihak sekolah melainkan hanya peringatan secara lisan saja.

### **B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Jakarta Timur Wilayah II**

#### 1. Komunikasi

Sosialisasi langsung terhambat karena pihak Kasi Kecamatan yang sering kali tidak hadir dalam pertemuan bahkan sulit untuk berkoordinasi, hal ini yang

berdampak pada terlambatnya informasi sampai ke pihak sekolah.

#### 2. Sumberdaya

Jumlah sumberdaya manusia di sekolah tidak sebanding dengan jumlah pendaftar dan jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan berakibat pada terhambatnya implementasi program. Tidak ada anggaran khusus untuk survey lokasi dan hal administratif lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia sebagian masih layak pakai dan mampu mendukung keberlangsungan program kendala hanya terletak pada modem/ koneksi internet.

#### 3. Diposisi

Pelaksana kebijakan (sekolah) mengeluh pekerjaan yang bertambah dengan adanya program KJP.

#### 4. Struktur Birokrasi

Ada sekolah yang belum mengetahui juknis Program KJP namun mereka tetap mengikuti aturan yang diberitahukan pihak UPT P6O.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP.
2. KJP belum sepenuhnya tepat sasaran karena data yang menjadi acuan tidak diupdate setiap tahun sedangkan pendaftar KJP dijamin setiap dua kali dalam setahun, hal tersebut yang mengakibatkan jumlah sasaran tidak presisi dengan acuan
3. Terkait dengan mekanisme masih sering kali terjadi kendala teknis seperti kesalahan input data, lemahnya jaringan internet dan sampai kepada ketidakpahaman pihak sekolah maupun orang tua mengenai peraturan dalam kebijakan KJP

4. Rendahnya pengawasan dan kesadaran pelaporan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan orang tua peserta didik penerima KJP

5. Faktor komunikasi, sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan KJP karena dinilai masih terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut. Berbeda halnya dengan faktor sumberdaya fasilitas/sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi KJP karena sarana dan prasarana baik di UPT 60 maupun di sekolah dinilai baik dalam mendukung kebijakan KJP.

### **B. Saran**

Masukkan yang dapat peneliti berikan terkait dengan permasalahan Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Pada Sekolah Dasar (SD) Negeri

di Jakarta Timur Wilayah II adalah sebagai berikut:

1. Ditambahnya persyaratan nilai rapot bagi peserta didik penerima KJP dan memberikan batas minimal nilai yang harus dicapai oleh peserta didik penerima KJP. Hal ini dilakukan guna meningkatkan minat belajar peserta didik, jadi tidak hanya membantu secara finansial namun juga meningkat pula kualitas pendidikannya
2. Diperbaharuinya instrumen wawancara agar sesuai dengan realita yang ada. Selain itu bahan masukan dari pihak RT atau RW tempat tinggal peserta didik juga dibutuhkan karena RT/RW adalah lembaga administrasi paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat yang mengetahui keadaan masyarakatnya.
3. Memperbaiki sistem sosialisasi dengan mengadakan pertemuan rutin dengan sekolah langsung tanpa melalui Kasi Kecamatan ataupun Sudin Wilayah, hal ini dilakukan agar pihak UPT P6O benar-benar mengetahui bagaimana jalannya implementasi kebijakan ini di

sekolah selain itu pula agar terjalin koordinasi yang baik dan menghindari kesalahpahaman.

4. Terkait dengan penyalahgunaan dana karena sistem non-tunai lebih baik dibuat peraturan bahwa penggunaan dana KJP hanya bisa dipergunakan di koperasi sekolah agar supaya lebih mudah mengontrol penggunaan dana tersebut.
5. Pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan di sekolahnya
6. Dibentuknya staff khusus di sekolah yang berfokus pada penanganan KJP. Hal ini dilakukan agar program KJP di sekolah lebih efektif dan efisien serta tidak mengganggu proses kegiatan belajar dan mengajar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Darmadi, D., Sukidin. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E., Sulistyaningsih. 2012. *Implementasi Kebijakan Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumidjo, Wahjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Warsito, Utomo. 2006. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Peraturan Perundangan:**
- Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2015 tentang *Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar*

**Website :**

*ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah.* diakses dari <http://jatimterkini.com/> pada hari Selasa, 9 Desember 2014 pukul 18.00 WIB

*Tentang KJP* diakses dari [jakarta.kjp.go.id/](http://jakarta.kjp.go.id/) diunduh pada Senin, 8 Desember 2014 pukul 08.42 WIB.

**Skripsi:**

Prayoga, Agryan Wahyu. 2014. Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Suripto, Nadia. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA/SMK Jakarta Selatan Pada Periode Tahun Ajaran 2013-2014. Skripsi. Universitas Diponegoro.